



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA DEPOK



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perlindungan-Nya sehingga sepanjang tahun 2018 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan baik. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok mempunyai Fungsi sebagai Dinas yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman serta pertanahan. Adapun beberapa kendala yang kami hadapi pada tahun 2018 yang menyebabkan beberapa target kinerja tidak tercapai, tetapi hal tersebut akan kami gunakan sebagai dasar evaluasi menyeluruh dan masukan dalam perencanaan kinerja kedepan.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman kearah yang lebih baik dalam melaksanakan perannya secara optimal, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018, kami terus menyempurnakan proses evaluasi dan *reviu* terhadap sistem yang belum berjalan secara efektif, serta semakin menajamkan kinerja individu dengan melakukan *alignment* penilaian kinerja organisasi. Kedepan, kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok agar keberadaan kami lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Dinas Perumahan dan Permukiman atas kerja kerasnya dalam menjalankan tiap program dan kegiatan.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Depok, Februari 2019

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok

Drs. H. Dudi Mi'raz Imaduddin, M.Si
NIP. 19691008 199010 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Clean Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat ukur akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Dengan langkah ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam menjalankan program dan kegiatan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan public dan mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 - 2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2018 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja sebagai berikut:



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Predikat SAKIP	Predikat	B	-	-
		2. Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Baik	Baik	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	3. Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	1,07	0,90	119%
		4. Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	%	84	87,60	104%
		5. Jumlah backlog kepemilikan rumah	Unit	124046	77601	159%
		6. Persentase rumah layak huni	%	99.39	99,62	100,2%
3	Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air	7. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	91.18	77,20	85%
4	Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	8. Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L	%	90	100	111,1%

bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja 100%, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya mencapai target kinerja 100%, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan 1 (satu) indikator kinerja yang memperoleh capaian kinerja dibawah 100% yaitu persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman pada sasaran strategis meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air hanya mendapatkan capaian 85%, dikarenakan program/ kegiatan pembangunan jaringan distribusi air bersih perpipaan tidak hanya dilakukan untuk jaringan sambungan rumahnya tetapi juga termasuk pembangunan jaringan primer sehingga menyebabkan penurunan realisasi target pembangunan,



kemudian pada program/ kegiatan pekerjaan air bersih non perpipaan yang berlokasi Kp. Benda Cipayung (yang terkena dampak TPA Cipayung) dan merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan sedang sehingga menyulitkan mobilisasi alat dan material, pada pekerjaan ini juga membangun instalasi baru (tower baru) dan penyelesaian pekerjaan instalasi air bersih non perpipaan tahun sebelumnya (2016), sehingga menyebabkan penurunan realisasi target pembangunan.

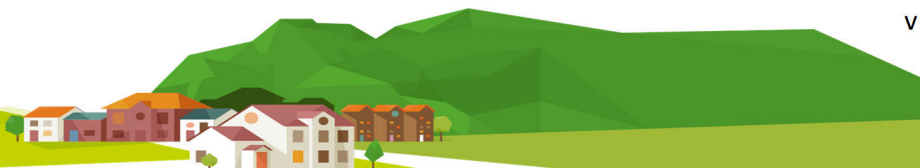
Depok, Februari 2019
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok

Drs. H. Dudi Mi'raz Imaduddin, M.Si
NIP. 19691008 199010 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman.....	2
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
D. Isu Strategis	6
E. Landasan Hukum	7
F. Sistematika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu.....	9
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
C. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	18
B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	22
D. Pengukuran, Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	25
E. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	27
F. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (SPM)	28
G. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Telah Dilakukan	36
H. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
I. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	61
J. Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN	





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Dan Permukiman selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan



penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok mempunyai tugas melaksanakan urusan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja (RKT) dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian akhir, akan disajikan rekomendasi yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan termasuk peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.



C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan. Adapun fungsi dari Dinas Perumahan dan Permukiman adalah:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perumahan Dan Permukiman Meliputi Perumahan, Permukiman, Dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perumahan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Perumahan;
 - b. Seksi Penataan Kawasan Perumahan.
3. Bidang Permukiman membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
4. Bidang Tata Bangunan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Bangunan;
 - b. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik;
 - c. Seksi Rehabilitasi Gedung Pemerintah.
5. Bidang Pertanahan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Administrasi Pertanahan;
 - b. Seksi Pengadaan Tanah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

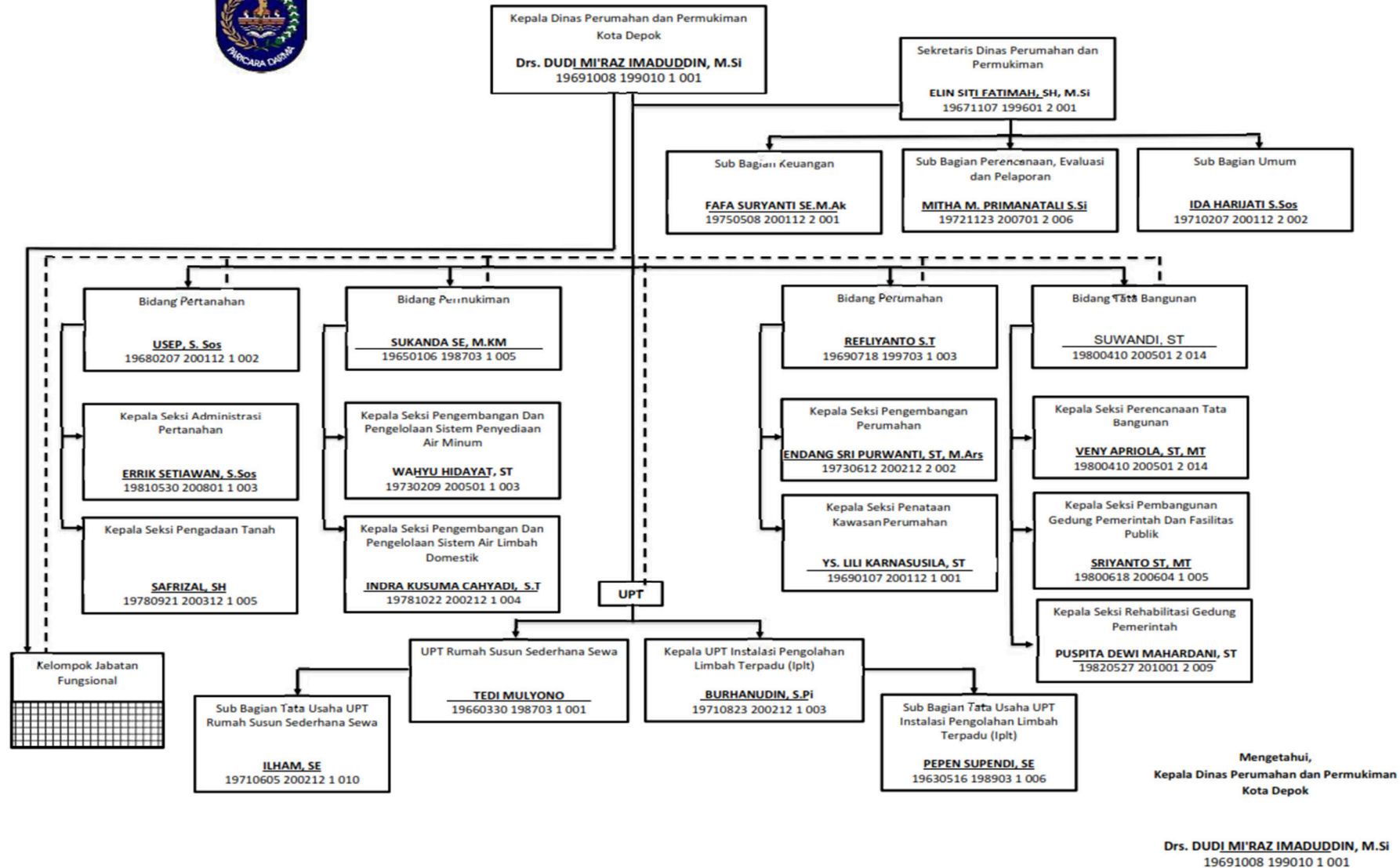


7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok terdiri dari:



DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK TAHUN 2018



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok

D. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berpegang kepada aspek strategis organisasi dan menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*) antara lain :

1. Faktor SDM:

- a) Sumber daya manusia yang ada harus mengerti dan paham akan tugas pokok dan fungsi yang ada dan tupoksi yang diberikan.
- b) Sumber Daya Manusia yang ada diharapkan selain menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada juga didukung dengan mampu dan terampilnya menggunakan sarana prasarana yang ada (komputer, program, dll)
- c) Sumber Daya Manusia yang ada didukung oleh personil 68 (Enam Puluh Delapan) Aparatur Sipil Negara dan 81 (Delapan Puluh Satu) tenaga non-ASN.

2. Faktor sarana dan prasarana:

- a) Perlengkapan kerja merupakan salah satu hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Jenis perlengkapan yang dimiliki harus lengkap dan dalam kondisi yang baik.
- b) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dan tidak layak akan sangat menghambat Kinerja para pegawai yang ada.

3. Faktor Penganggaran:

- a) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.
- b) Dalam menyusun Rencana Anggaran perlu di pikirkan rencana kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang agar pada saat pelaksanaan kegiatan tidak timbul masalah dan anggaran yang ada dapat digunakan sesuai dengan kapasitas yang ada.

4. Faktor Kinerja:

- a) Keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan teknis.
- b) Keterlambatan pelaksanaan lelang.
- c) Adanya paket pekerjaan gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk proses lelang ulang sampai dengan pelaksanaan pekerjaannya.
- d) Banyaknya jumlah paket pekerjaan konstruksi dibandingkan dengan jumlah aparatur yang tersedia menyulitkan monitoring dan pengawasan internal.
- e) Kurang kuatnya pengawasan/ supervisi atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi.



E. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Depok nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
10. Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2018;



F. Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok selama Tahun 2018.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini digambarkan mengenai akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Depok.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok



telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Renja PD, sehingga Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan.

1. Visi



Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Depok dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul didefinisikan sebagai :



Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

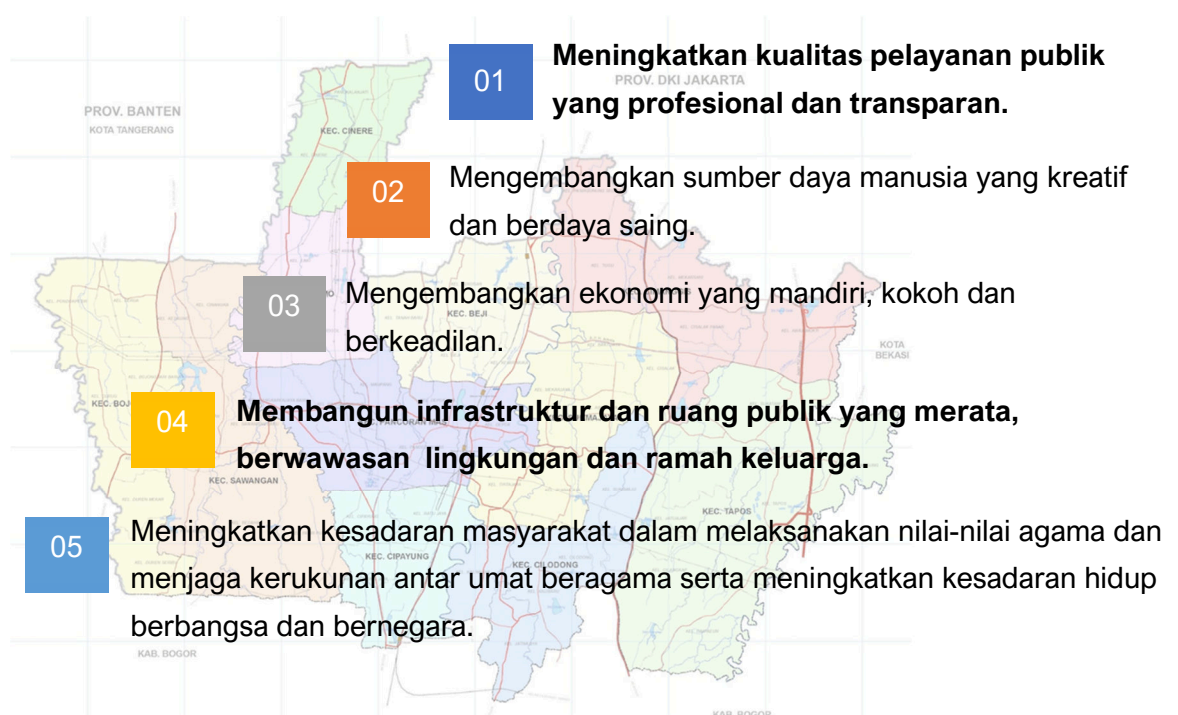
Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Misi

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka Kota Depok merumuskan dari 5 (lima) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :



Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan misi 1 dan misi 4 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.



3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan. Sejalan dengan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 serta perubahan nomenklatur Dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Depok oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang semula sebanyak 5 (lima) sasaran menjadi 4 (empat) sasaran strategis setelah dilakukan reuiu.

Hasil reuiu pada rencana strategis Sekretariat Daerah terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reuiu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2013 - 2018.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reuiu rencana strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok antara lain:

1. Rekomendasi Bappeda Kota Depok
 - a. Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing;
 - b. Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.
2. Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - a. Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - b. Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan;
 - c. Penambahan beberapa indikator;
 - d. Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja;



- e. Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing pejabat struktural dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target yang menjadi fokus Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 – 2021 setelah dilakukan reuiu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Disrumkim

TUJUAN SEBELUM REVIU	TUJUAN SETELAH REVIU	SASARAN SEBELUM REVIU	SASARAN SETELAH REVIU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2		3	4
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan					
Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana tata ruang	Meningkatkan kualitas pelayanan	Tersusunnya rencana tata ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
		Terkendalinya pemanfaatan ruang		Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
Misi 4: Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga					
Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan perumahan/permukiman yang layak, tertata dan sehat	Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Nyaman	Tersedianya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman dan didukung oleh ketersediaan air bersih dan prasarana, sarana dan utilitas lainnya	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	Menyediakan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman yang berkualitas
				Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Peningkatan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam pelayanan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	Tersedianya gedung pemerintah dan prasarana pelayanan public yang memadai	Meningkatnya Jaringan dan Keberlanjutan Ketersediaan Air	Meningkatkan layanan penyediaan air bersih	Peningkatan layanan penyediaan air bersih
Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Meningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Limbah	Terlaksananya program dan pelayanan secara optimal dan akuntabel	Meningkatnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	Meningkatkan Layanan Pengelolaan Limbah	Peningkatan Cakupan Layanan IPLT

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan



sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Nomor: 821.29/74/Sekret-PEP/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi 2 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 - 2021, berdasarkan hasil reviu IKU. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok hasil *reviu* sebanyak 8 (delapan) Indikator. Perubahan IKU Dinas Perumahan dan Permukiman sebelum dan setelah *reviu* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Disrumkim

No	IKU Sebelum <i>Reviu</i>	No	IKU Setelah <i>Reviu</i>	Penjelasan
1	Jumlah Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik	-	Indikator direvisi menjadi indikator pendukung	-
2	Jumlah Area Pengadaan Lahan Pemerintah	-	Indikator direvisi menjadi indikator pendukung	-
3	Cakupan Integrasi Perencanaan	-	Indikator direvisi menjadi indikator pendukung	-
		1	Predikat SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kinerja 30% • Pengukuran kinerja 25% • Pelaporan kinerja 15% • Evaluasi kinerja 10% • Capaian kinerja 20% • Total 100%
		2	Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan yang dirasakan dan harapan
4	Persentase luas kawasan kumuh yang ditata	3	Rasio permukiman layak huni	Formulasi Perhitungan = $(\sum \text{luas permukiman layak}) / (\sum \text{luas permukiman}) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data: Bidang Perumahan
5	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	-	Indikator direvisi menjadi indikator pendukung	-
6	Jumlah IPAL Komunal terbangun dan terpelihara	-	Indikator direvisi menjadi indikator pendukung	-
7	Jumlah KK yang mendapat akses Septictank	4	Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	Formulasi Perhitungan = $(\sum \text{jumlah rumah tangga bersanitasi}) / (\sum \text{jumlah rumah tangga}) \times 100\%$
8	Jumlah KSM Pengelola IPAL Komunal Berbasis Masyarakat terbina	-	Indikator direvisi menjadi indikator pendukung	-



No	IKU Sebelum <i>Reviu</i>	No	IKU Setelah <i>Reviu</i>	Penjelasan
9	Jumlah Rumah Susun Terbangun dan terpelihara	-	Indikator direvisi menjadi indikator pendukung	-
10	Jumlah Backlog kepemilikan rumah	5	Jumlah Backlog kepemilikan rumah	Formulasi Penghitungan: Backlog = Jml KK – Jml KK yang memiliki rumah Jumlah KK yang memiliki rumah = Jumlah KK x prosentase KK yang memiliki rumah tinggal (sumber data KK memiliki Rumah dari Inkesra) <ul style="list-style-type: none"> Type Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Bidang Perumahan
11	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6	Rasio rumah layak huni	Formulasi Perhitungan = $(\sum \text{jumlah rumah layak huni}) / (\sum \text{jumlah seluruh rumah}) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Sumber Data: Bidang Perumahan
12	Cakupan Layanan Air Bersih Perpipaan dan Non Perpipaan	7	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Formulasi Perhitungan = $(\sum \text{penduduk memiliki akses air minum aman}) / (\sum \text{penduduk}) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Type Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Bidang Permukiman
13	Persentase Cakupan Pelayanan IPLT	8	Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L	Hasil uji lab dibanding standar baku mutu kementerian LHK <ul style="list-style-type: none"> Type Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: UPT IPLT

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:



1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaiantujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 dan perubahannya serta hasil *reviu*. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Disrumkim Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Predikat SAKIP	Predikat	B
		2. Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Baik
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	3. Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	1.07
		4. Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	%	84
		5. Jumlah backlog kepemilikan rumah	Unit	124046
		6. Persentase rumah layak huni	%	99.39
3	Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air	7. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	91.18
4	Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	8. Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L	%	90



Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang diperjanjikan didukung oleh 14 (empat belas) Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 241.369.702.984,00.

Tabel 2.4 Program dan Anggaran Disrumkim Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.037.000.000,00	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	467.000.000,00	APBD
3	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90.000.000,00	APBD
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan	115.527.009.572,00	APBD dan BANPROV
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	4.028.453.750,00	APBD
6	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	649.520.000,00	APBD
7	Pelayanan Pengelolaan Air Limbah	14.381.870.776,00	APBD, BANPROV DKI dan DAK
8	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	3.469.810.000,00	APBD
9	Pengembangan dan Pemeliharaan Perumahan Bersusun	2.315.000.000,00	APBD
10	Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih	3.533.740.886,00	APBD dan DAK
11	Penataan Permukiman Kumuh	2.298.100.000,00	APBD
12	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	188.418.000,00	APBD
13	Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan	8.292.600.000,00	APBD
14	Penyediaan RTH yang Berfungsi Sebagai Alun-Alun Kota	37.500.000.000,00	APBD
15	Penataan dan Pengadaan Lahan	47.591.180.000,00	APBD
TOTAL		241.369.702.984,00	





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok selaku pelayan masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kota Depok.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Kuning
4	Kurang	50.00 – 64.99	Jingga
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Dan Permukiman berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Nomor: 821.29/74/Sekret-PEP/2018, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 8 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Nomor: 821.29/74/Sekret-PEP/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas



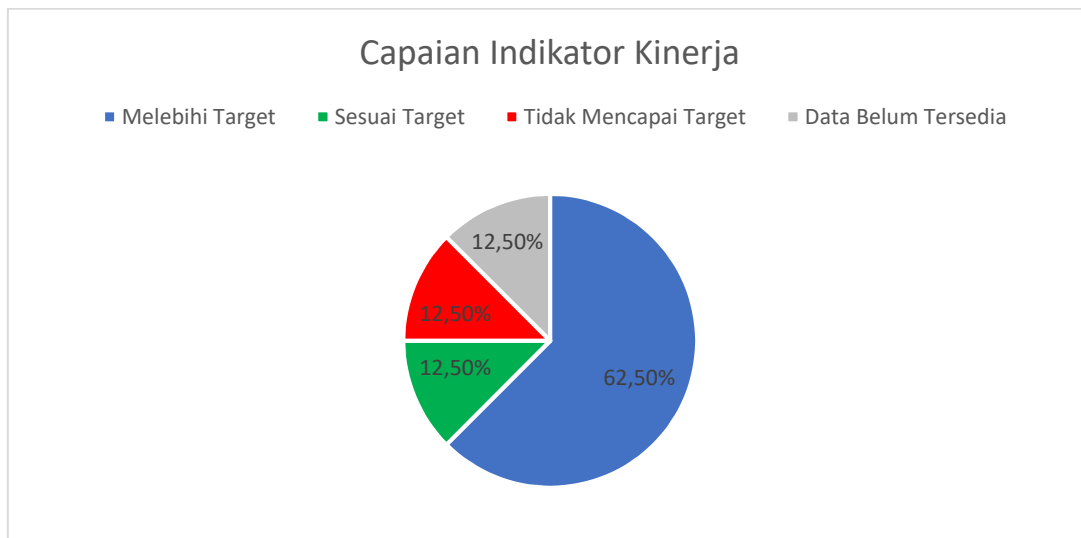
Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok juga melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

*Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Predikat SAKIP	Predikat	B	-	-
		2. Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Baik	Baik	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	3. Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	1,07	0,90	119%
		4. Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	%	84	87,60	104%
		5. Jumlah backlog kepemilikan rumah	Unit	124046	77601	159%
		6. Persentase rumah layak huni	%	99.39	99,62	100,2%
3	Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air	7. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	91.18	77,20	85%
4	Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	8. Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L	%	90	100	111,1%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) rata-rata Capaian Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok pada tahun 2018 diluar indikator sasaran yang belum dilakukan pengukuran sebesar 110.63 % atau melebihi target. Gambaran capaian indikator Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 3.1 Diagram Pengukuran Kinerja Disrumkim Tahun 2018

Keberhasilan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 berdasarkan capaian kinerja yang melebihi/ melampaui target ditunjukkan pada 5 (lima) indikator yaitu Persentase berkurangnya luas Kawasan kumuh dengan capaian kinerja 119%, pada indikator Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik dengan capaian kinerja 104%, pada indikator Jumlah backlog kepemilikan rumah dengan capaian kinerja 159% dan indikator Kualitas effluent IPLT dengan capaian 111,1%, capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada 1 (satu) indikator yaitu Servei kepuasan masyarakat (IKM) dengan indeks baik serta capaian kinerja yang tidak mencapai target ditunjukkan pada 1 (satu) indikator yaitu Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman sengan capaian kinerja hanya 85%. Sedangkan 1 (satu) indikator tidak tersedia data dan belum dilakukan pengukuran kinerja yaitu pada indikator Predikat SAKIP yang belum dilakukan pengkuran untuk tahun 2018.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk



mencapai visi dan misi Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 - 2021 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 2 (dua) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Permukiman, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 8 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Predikat SAKIP	Predikat	B	-	-
		2. Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Baik	Baik	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	3. Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	1,07	0,90	119%
		4. Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	%	84	87,60	104%
		5. Jumlah backlog kepemilikan rumah	Unit	124046	77601	159%
		6. Persentase rumah layak huni	%	99.39	99,62	100,2%
3	Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air	7. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	91.18	77,20	85%
4	Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	8. Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L	%	90	100	111,1%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut:



Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampai Target	62.50 %
2	Sesuai Target	12.50 %
3	Tidak Mencapai Target	12.50 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampai target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00
2	Misi 4	6	5	83.33	0	0.00	1	16.67
	Jumlah	8	5	62.50	1	12.50	1	12.50

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 8 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampai Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	6	
1	Melebihi/Melampai Target	5	83.33 %
2	Sesuai Target	0	00.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	16.67 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna



perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

D. Pengukuran, Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Setelah diperoleh perbandingan antara target dan realisasi indikator sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:



Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Disrumkim Tahun 2016 - 2018

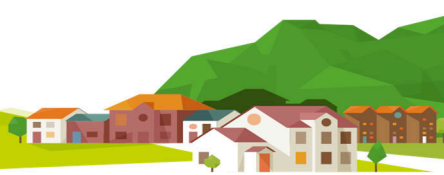
No	Indikator	Realisasi 2016	Target 2016	Capaian 2016 (%)	Realisasi 2017	Target 2017	Capaian 2017 (%)	Realisasi 2018	Target 2018	Capaian 2018 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD 2021
1	Predikat SAKIP Disrumkim	B	BB	50,00%	B	B	100,00%	-	B	-	-	BB
2	Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100,00%	Baik	Baik	100,00%	Baik	Baik	100,00%	√	Baik
3	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	4,20%	4,20%	100,00%	2,47%	2,52%	102,02%	0,90%	1,07%	119%	√	0%
4	Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	n/a	n/a	n/a	82,75%	82,75%	100,00%	87,60%	84,00%	104%	√	100%
5	Jumlah backlog kepemilikan rumah (unit)	124.046	124.046	100,00%	121.229	124.046	102,32%	77.601	124.046	159%	√	121.796
6	Persentase Rumah Layak Huni	83,40%	99,90%	83,48%	99,07%	98,96%	1041%	99,62	99,39%	100,20%	√	99,50%
7	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Air Minum yang Aman	73,52%	73,52%	100,00%	75,60%	75,00%	100,80%	77,20%	91,18%	85,00%	x	100%
8	Kualitas Effluen IPLT : BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 mgL	n/a	n/a	n/a	100,00%	90,00%	111,11%	100,00%	90,00%	111,11%	√	100%

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Realisasi kinerja Tahun 2018 adalah pelaksanaan Kinerja tahun ke-2 (dua) dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 - 2021. langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Adapun capaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET sd 2018	REALISASI sd 2018
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Predikat SAKIP	Predikat	B	-
		2. Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Baik	Baik
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	3. Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	1,07	0,90
		4. Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	%	84	87,60
		5. Jumlah backlog kepemilikan rumah	Unit	124046	77601
		6. Persentase rumah layak huni	%	99.39	99,62
3	Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air	7. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	91.18	77,20
4	Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	8. Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L	%	90	100



F. Merbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (SPM)

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 01 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini agar masyarakat mendapatkan akses air minum yang aman, sistem air limbah yang memadai serta permukiman yang layak serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

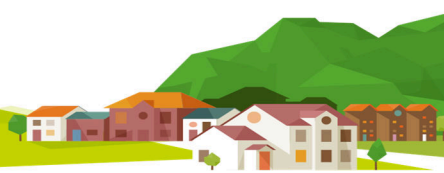
1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Penyediaan Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum dinilai dari persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman dalam kurun waktu satu tahun dari target pelaksanaan hingga tahun 2019 sebesar 81,77%.

Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

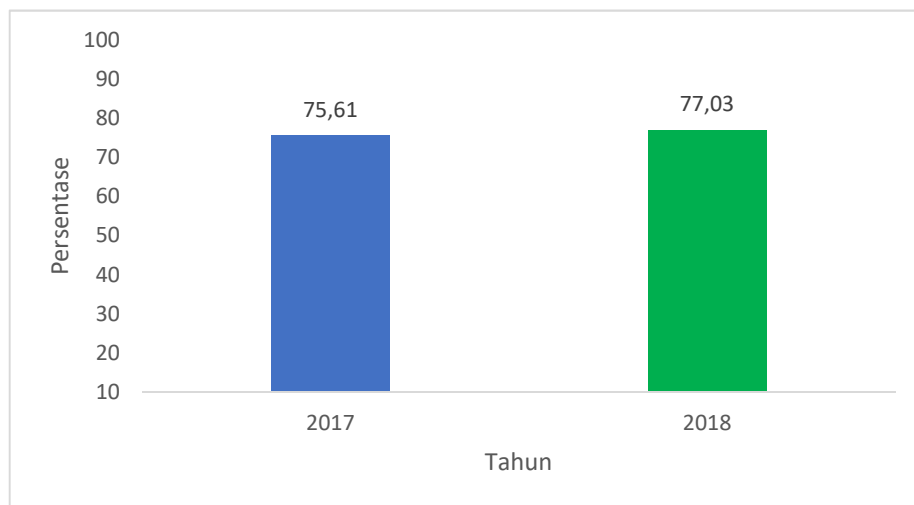


SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb:

$$\text{SPM} = \frac{\text{Jumlah masyarakat terlayani}}{\text{Jumlah total masyarakat}} \times 100\%$$

Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman dari tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,42%, yaitu dari 75,61% pada tahun 2017 menjadi 77,03% pada tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2 Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum yang Aman di Kota Depok Tahun 2017-2018



Sumber : Bidang Permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Tahun 2018

2) Penyediaan Sanitasi

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Sedangkan sasaran penyediaan sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman. Dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Permukiman memberikan penyediaan sanitasi berupa pengelolaan air limbah permukiman.



Air limbah permukiman adalah semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari permukiman.

Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

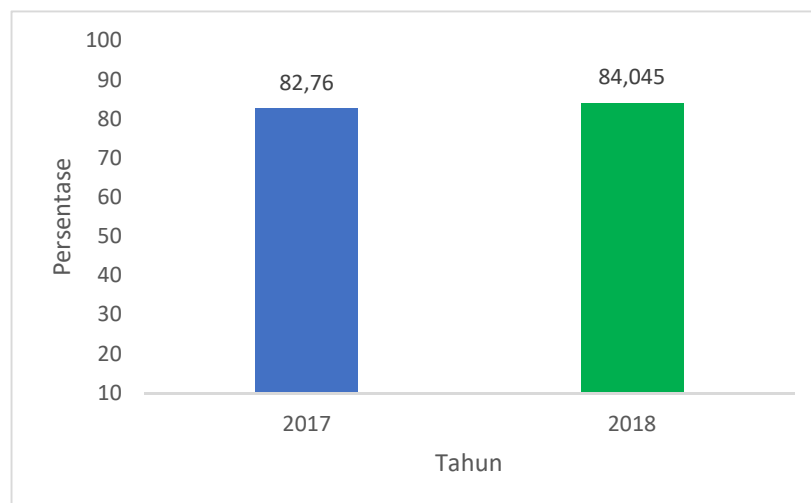
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan penyediaan sanitasi dinilai dari persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dalam kurun waktu satu tahun dari target pelaksanaan hingga tahun 2019 sebesar 60%.

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah persentasi jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah – SPAL Terpusat) pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk. Atau, dirumuskan sbb:

$$\text{SPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK}}{\text{Jumlah total penduduk seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai mengalami peningkatan sebesar 1,29%, yaitu dari 82,76% pada tahun 2017 menjadi 87,60% pada tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai di Kota Depok Tahun 2017-2018



Sumber : Bidang Permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok



3) Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

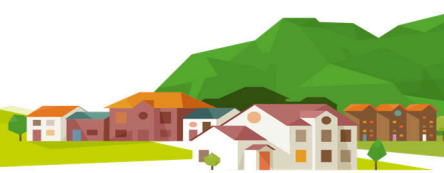
Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni an/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan penanganan permukiman kumuh perkotaan dinilai dari persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dalam kurun waktu satu tahun dari target pelaksanaan hingga tahun 2019 sebesar 10%.

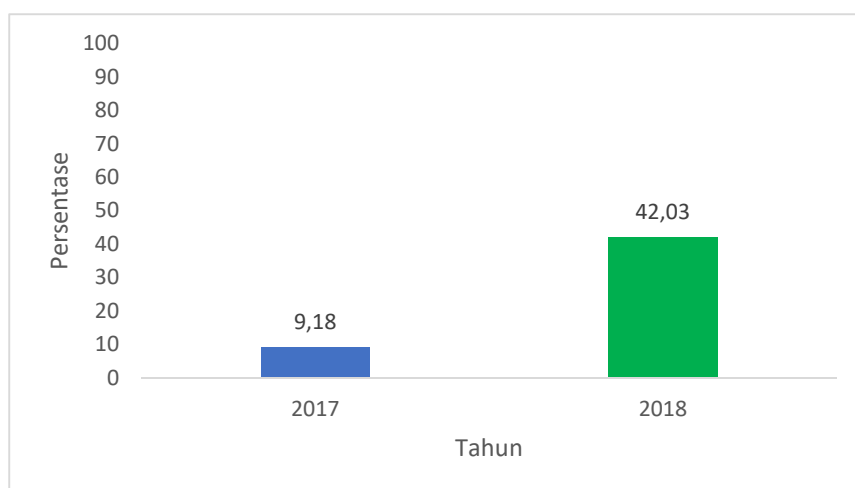
SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kota Depok hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di kota Depok. Atau, dirumuskan sbb :

$$\text{SPM} = \frac{\text{Jumlah permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Jumlah total kumuh yang telah ditetapkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan SK Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota Depok pada tahun 2015, luas permukiman kumuh di Kota Depok adalah 132,72 Ha. Pada tahun 2017, terdapat kegiatan yang mengakomodir yaitu pembangunan infrastruktur kawasan kumuh dan program KOTAKU. Dari kegiatan tersebut diperoleh data bahwa permukiman kumuh di Kota Depok berkurang sebesar 12,19 Ha dan mendapat capaian sebesar 9,18%. Sedangkan pada tahun 2018 permukiman kumuh di Kota Depok berkurang sebesar 55,19 Ha dan mendapat capaian sebesar 42,03%. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini:



Gambar 3.4 Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kota Depok Tahun 2017-2018



Sumber : Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok

Tabel 3.8 Target Pencapaian SPM oleh Daerah dan Pusat Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR	TARGET
1	Penyediaan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77%
2	Penyediaan sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60%
3	Penanganan permukiman kumuh perkotaan	Persentase berkurangnya luas permukiman kumuh di perkotaan	10%

Realisasi yang dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2017		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
1	Penyediaan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	Jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh kabupaten/kota tersebut pada akhir tahun pencapaian SPM	1.679.067 orang	2.179.813 orang	77,03



			pada akhir pencapaian SPM				
2	Penyediaan sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK Komunal/SPAL Terpusat	Jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota pada akhir tahun pencapaian SPM	458.099 orang	545.066 orang	87,60
3	Penanganan permukiman kumuh perkotaan	Persentase berkurangnya luas permukiman kumuh di perkotaan	Jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani sejak diterbitkannya Permen tentang SPM bidang PU dan Penataan Ruang hingga akhir tahun pencapaian SPM	Jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55,78 Ha	132,72 Ha	42,03

Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Dinas Perumahan dan Permukiman bersumber dari APBD Kota dan APBN (DAK), yaitu :

1) APBD Kota

Belanja Langsung sebesar Rp 20.840.161.662,00 (dua puluh milyar delapan ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sementara realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp 18.079.364.732,00 (delapan belas milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

2) APBN

Berupa DAK sebesar Rp 2.943.575.662,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sementara realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp 2.943.575.662,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).

3) Bantuan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Berupa bantuan keuangan sebesar Rp 1.451.566.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), sementara realisasi anggaran yang digunakan sebesar 1.451.566.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Dukungan Personil

Dukungan personil dalam mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2017 antara lain :

1) Penyediaan Air Minum

Pegawai yang mendukung pencapaian SPM dalam penyediaan air minum adalah 13 orang, yang terdiri dari 9 orang PNS dan 4 orang Non PNS.

2) Penyediaan Sanitasi

Pegawai yang mendukung pencapaian SPM dalam penyediaan sanitasi adalah 13 orang, yang terdiri dari 9 orang PNS dan 4 orang Non PNS.

3) Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Pegawai yang mendukung pencapaian SPM dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah 16 orang, yang terdiri dari 11 orang PNS dan 5 orang Non PNS.

Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Penyediaan Air Minum

Permasalahan

- a) Kurangnya database penduduk rawan air minum;
- b) Belum adanya kelengkapan data potensi mata air di Kota Depok;
- c) Dalam pelaksanaan kegiatan masih beberapa kali terjadi *overlap* dengan kegiatan PDAM;
- d) Keterbatasan anggaran kegiatan serta wewenang dalam intervensi kegiatan.

Solusi

- a) Perlu dilakukan *updating* data secara berkala mengenai data penduduk rawan air minum;
- b) Perlu dilakukan pendataan secara rinci mengenai data potensi sumber mata air di Kota Depok;
- c) Perlu dilakukan pemetaan kegiatan antara PDAM dengan Disrumkim;
- d) Perlunya rasionalisasi anggaran yang disesuaikan target *output* maupun *outcome* yang akan dicapai dan juga kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan dana bantuan seperti DAK atau lainnya.



2) Penyediaan Sanitasi

Permasalahan

- a) Keterbatasan lahan di permukiman rawan sanitasi karena untuk kegiatan ini diperlukan lahan minimal 30 m²;
- b) Teknologi yang digunakan masih anaerob yang kinerjanya masih mengharuskan melihat dari kontur lahan yang menyebabkan kurang optimalnya penerima manfaat.

Solusi

- a) Pemerintah menyiapkan lahan khusus untuk IPAL Komunal di lokasi permukiman padat penduduk;
- b) Perlu disediakan anggaran lebih guna merubah sistem pengolahan IPAL dari anaerob menjadi aerob sehingga penerima manfaat lebih manfaat.

3) Penanganan permukiman kumuh perkotaan

Permasalahan

- a) Terbatasnya anggaran menjadi masalah dalam percepatan pengentasan kawasan kumuh perkotaan
- b) Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, seringkali ada warga yang menolak kawasan kumuhnya diperbaiki karena takut lahan yang setelah diperbaiki akan diambil alih oleh pemerintah

Solusi

- a) Melakukan kerjasama dengan KOTAKU, provinsi, maupun swasta (CSR)
- b) Melakukan sosialisasi secara detail sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan warga yang lahannya masuk dalam kawasan kumuh yang akan diperbaiki

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2018 antara lain:

Tabel Program dan kegiatan yang mendukung SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JENIS PELAYANAN DASAR	NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Air Minum	1	Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih	3.533.740.886	2.991.813.586	84,66



JENIS PELAYANAN DASAR	NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
	1	Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Perpipaan	2.204.800.000	1.984.846.000	90,02
	2	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Non Perpipaan	1.050.000.000	748.377.000	71,27
	3	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama dan Retikulasi Kelurahan Sawangan Baru (DAK Penugasan TA 2017)	78.940.886	78.940.086	100,00
	4	Pendataan Sumber Mata Air Kota Depok	200.000.000	179.650.500	89,83
Penyediaan Sanitasi	1	Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan	7.892.600.000	7.812.414.500	98,98
	1	Pembangunan Septictank	7.692.600.000	7.614.574.500	98,99
	2	Pemeliharaan Septictank	200.000.000	197.840.000	98,92
	2	Pelayanan Pengelolaan Air Limbah	6.815.720.776	5.248.809.418	77,01
	1	Pembangunan IPAL Komunal (DAK Fisik TA 2018)	2.764.000.000	2.764.000.000	100,00
	2	Pembinaan KSM Pengelola IPAL Komunal Berbasis Masyarakat	120.000.000	120.000.000	100,00
	3	Pembangunan IPAL Komunal (DAK Penugasan TA 2017)	100.634.776	100.634.776	100,00
	4	Pembangunan IPAL Komunal (Bankeu Pemprov DKI Jakarta TA. 2018)	1.451.566.000	0	0
	5	Pemeliharaan IPAL Komunal	230.000.000	225.230.000	97,93
	6	Pembangunan IPAL Komunal	2.000.000.000	1.902.896.642	95,14
	7	Penyusunan Rancangan	149.520.000	136.048.000	90,99



JENIS PELAYANAN DASAR	NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik			
Penanganan permukiman kumuh perkotaan	1	Penataan Permukiman Kumuh	2.598.100.000	2.026.327.228	77,99
	1	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh	2.298.100.000	1.734.627.228	75,48
	2	Sinergitas Program Kotaku	300.000.000	291.700.000	97,23

2. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1) Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Rumah layak huni memiliki pengertian rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta Perumahan dan Permukiman penghuninya, sedangkan rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan rumah layak huni dan terjangkau dinilai dari cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dalam kurun waktu satu tahun dari target pelaksanaan antara tahun 2009 hingga tahun 2025.

a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

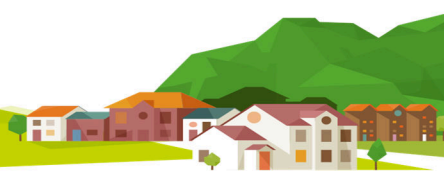
Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta Perumahan dan Permukiman penghuninya. Pencapaiannya dilihat dari presentase cakupan rumah layak huni, yang dihitung dari jumlah layak huni di suatu wilayah kabupaten/kota pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah di suatu wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu yang sama.

Yang termasuk dalam standar rumah layak huni adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut.



- a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi :
 - Struktur bawah/pondasi;
 - Struktur tengah/kolom dan balak (Beam);
 - Struktur atas.
 - b) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
 - c) Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang
- b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
- Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyarakat. Pencapaiannya dilihat dari presentase cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, yang dihitung dari jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga MBR dalam kurun waktu yang sama. Yang termasuk dalam standar rumah layak huni yang terjangkau adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut.
- a) Harga rumah dikategorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3 atau kurang;
 - b) Median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c) Median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

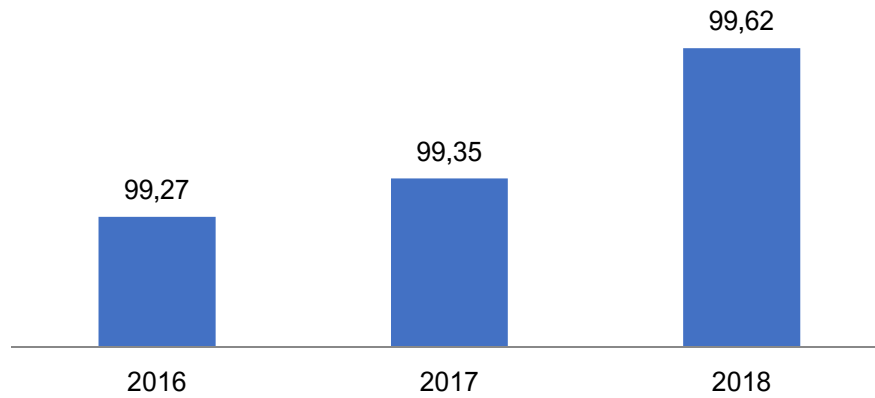
Terjadi peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni dari tahun 2016 hingga tahun 2018, yaitu dari 99,27% pada tahun 2016 menjadi 99,62% pada tahun 2018. Sementara cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan capaian hingga 2018, yaitu dari 90,36% pada tahun 2016, bahkan untuk tahun 2017 dan 2018 capaian belum dapat diketahui dikarenakan tidak adanya data valid mengenai jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau maupun jumlah keseluruhan rumah tangga MBR. Hal ini dapat dilihat pada grafik II.1 dan II.2 berikut.



Gambar II.1.
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
di Kota Depok Tahun 2016-2018

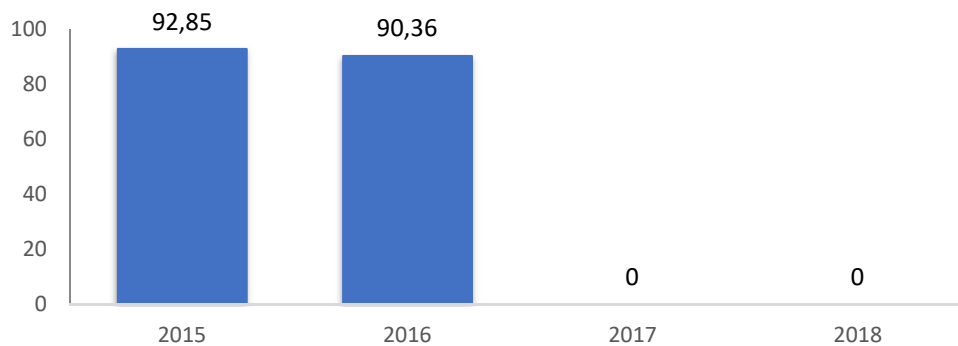
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kota Depok Tahun 2016 - 2018

■ Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kota Depok Tahun 2016 - 2018



Sumber: Bidang Perumahan Kota Depok, 2018

Gambar II.2.
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau
di Kota Depok Tahun 2015-2018



■ Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau di Kota Depok Tahun 2016-2018

Sumber: Bidang Perumahan Kota Depok, 2018

2) Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas

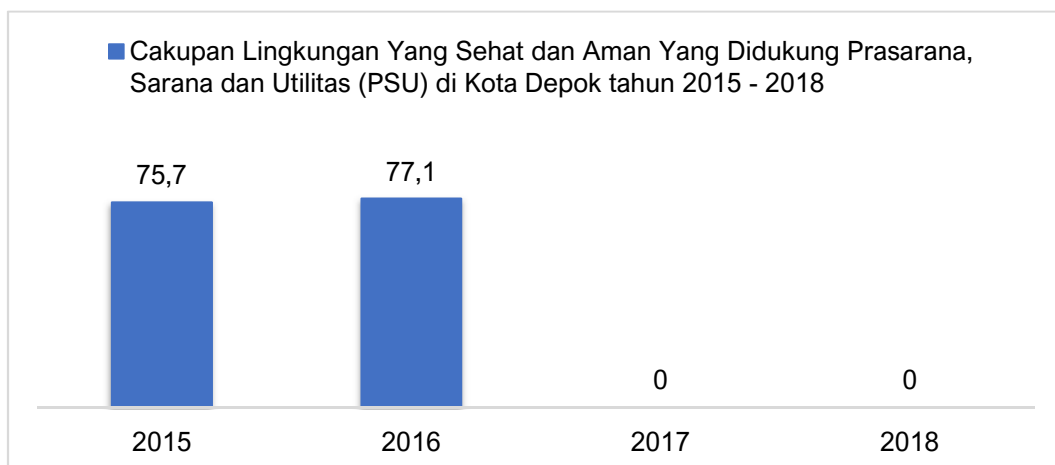


umum (PSU) dinilai dari cakupannya dalam kurun waktu satu tahun dari target pelaksanaan antara tahun 2009 hingga tahun 2025.

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin Perumahan dan Permukiman serta keamanan bagi masyarakat. Pencapaiannya dilihat dari persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU, yang dihitung dari jumlah lingkungan yang didukung PSU dibagi dengan jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu.

Terjadi peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dari tahun 2015 sampai dengan 2016, yaitu sebesar 75,7% pada tahun 2015 dan 77,1% pada tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 capaian belum dapat diketahui dikarenakan tidak adanya data valid mengenai jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat pada grafik II.3 berikut.

*Gambar II.3.
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
di Kota Depok Tahun 2015-2018*



Sumber: Bidang Perumahan Kota Depok, 2018



Target Pencapaian SPM Oleh Daerah Dan Pusat

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR	TARGET
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100%
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	70%
2	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	100%

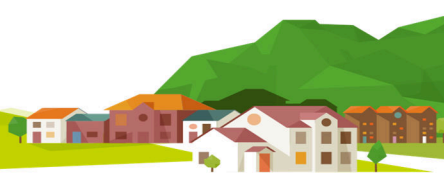
Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Permukiman. Berikut adalah capaian SPM tahun 2018:

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2018		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin Perumahan dan Permukiman serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada kurun waktu tertentu	Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tersebut	384.255	384.320	99,62
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah pada kurun waktu tertentu	-	-	-
2	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		-	-

Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan



Permukiman bersumber dari APBD Kota, yaitu Belanja Langsung sebesar Rp 3.008.228.000,00 (tiga milyar delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sementara realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp 2.964.712.228,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Dukungan Personil

Dukungan personil dalam mendukung pencapaian SPM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2017 adalah 15 pegawai yang terdiri dari:

- 1) 11 orang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Permukiman;
- 2) 4 orang Non PNS di Dinas Perumahan dan Permukiman.

Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Permasalahan

Capaian cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan telah mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Akan tetapi cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau belum dapat ditentukan capaian realisasi untuk tahun 2017 dan 2018 dikarenakan tidak didapatnya data mengenai jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau serta jumlah rumah tangga MBR pada tahun 2017 dan 2018.

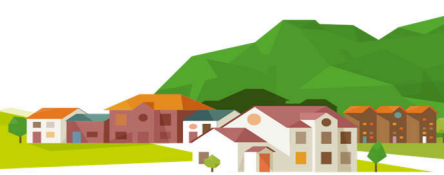
Solusi

Peningkatan kualitas data dengan cara meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan pihak-pihak terkait.

- 2) Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Permasalahan

Capaian cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dari tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 75,7% pada tahun 2015 dan 77,1% pada tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 capaian belum dapat diketahui dikarenakan kurang maksimalnya kinerja petugas dalam hal pengumpulan data, sistem pencatatan dan pelaporan sehingga data mengenai jumlah



lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu yang didapatkan belum optimal.

Solusi

Perlunya peningkatan kualitas data dengan cara melakukan pendataan mengenai lingkungan perumahan di Kota Depok secara rinci dan komprehensif.

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target SPM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok antara lain:

JENIS PELAYANAN DASAR	NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	188,418,000	176.780.228	93,82
	1	Monitoring dan Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni	113,418,000	102,938,000	90,76
	2	Penyusunan Standar Teknis Pembangunan Perumahan Sejahtera di Kota Depok	75,000,000	73,842,228	98,46
Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	2.819.810.000	2.787.932.000	98,87
	1	Pemeliharaan PSU Perumahan	2.769.810.000	2,738,267,000	98,86
	2	Updating dan Maintainance Aplikasi Sistem Informasi PSU Perumahan	50,000,000	49,665,000	99,33

G. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Telah Dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dan sebab - sebab



tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2018 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016-2021.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

- Sasaran 1, Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik.

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	100.00	B	-	-
2	Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Baik	Baik	100.00	Baik	Baik	100.00

Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Predikat SAKIP" belum dilakukan pengukuran dari target dengan predikat B yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.



Foto: Disrumkim meraih penghargaan Perencanaan Terbaik 2018

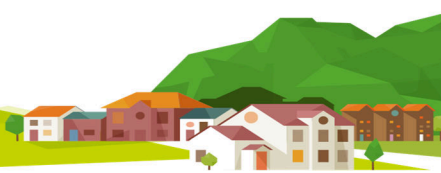


Capaian kinerja nyata indikator 2 "Survei kepuasan masyarakat (IKM)" adalah sebesar Baik dari target indeks Baik yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2018 adalah tahun ke 2 (dua) renstra, capaian kinerja indikator 1 "Survei kepuasan masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.



Foto: Wali Kota Depok meninjau pembangunan Alun-alun Kota Depok Tahap I dan Stadion Merpati Kota Depok

- ❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :
 - Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam mendukung penyusunan laporan;
 - Dukungan seluruh bidang dan UPT di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam memberikan data laporan;
 - Etos kerja yang baik dan ikhlas dari seluruh keluarga besar Dinas Perumahan dan Permukiman dalam membangun/ merehabilitasi/ menata sarana dan prasarana pelayanan di berbagai instansi.
- ❖ Hambatan :
 - Hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya;
 - Belum memahami akan pentingnya penyusunan pelaporan daerah sehingga dalam memproses/ menginput data terkadang masih lamban;
 - Proses perizinan terhadap bangunan milik pemerintah yang memerlukan waktu sehingga membagi konsentrasi tim teknis;
 - Belum adanya SOP dan kewenangan yang jelas mengenai penyerahan asset yang telah dibangun.
- ❖ Strategi / Upaya pemecahan masalah :
Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:



- o Melakukan pendampingan baik dalam memberikan pemahaman tentang sistem manajemen akuntabilitas kepada pimpinan SKPD/Unit kerja maupun dalam penyusunan dokumen pelaporan;
- o Penyusunan Laporan Kinerja, pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bagian ORB dan Inspektorat Kota Depok serta melakukan evaluasi secara internal (dokumen terlampir);
- o Melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai penyederhanaan perizinan untuk bangunan pemerintah;
- o Melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Aset mengenai penyerahan aset yang telah dibangun.

Misi 4

Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.

Sasaran 2, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

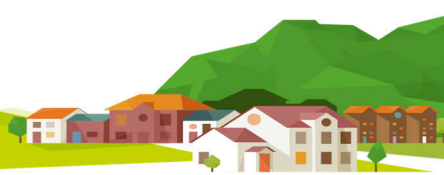
Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	2.52	2.47	102.02	1.07	0.90	119.00
4	Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	%	82.75	82.75	100.00	84.00	87.60	104.00
5	Jumlah backlog kepemilikan rumah	Unit	124046	121229	102.32	124046	77601	159.00
6	Persentase rumah layak huni	%	98.69	99.07	100.11	99.39	99.62	100.20

Sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh" adalah sebesar 0.90 dari target sebesar 1.07 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 119.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2018 adalah



tahun ke 2 (dua) renstra, capaian kinerja indikator 3 "Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh" tahun ini adalah sebesar 0.90 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman maka capaian kerjanya mencapai 99.10 %.



Foto: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik" adalah sebesar 87.60 % dari target sebesar 84.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.10 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2018 adalah tahun ke 2 (dua) renstra, capaian kinerja indikator 4 "Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik" tahun ini adalah sebesar 87.60 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman maka capaian kerjanya mencapai 87,60 %.



Foto: Pembangunan Septictank dan IPAL Komunal

Capaian kinerja nyata indikator 5 "Jumlah backlog kepemilikan rumah" adalah sebesar 77.601 dari target sebesar 124.046 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 159.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2018 adalah tahun ke 2 (dua) renstra, capaian kinerja indikator 5 "Jumlah backlog kepemilikan rumah" tahun ini adalah sebesar 77.601 unit, bila dibandingkan dengan target



akhir renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman maka capaian kerjanya mencapai 156.95 %.

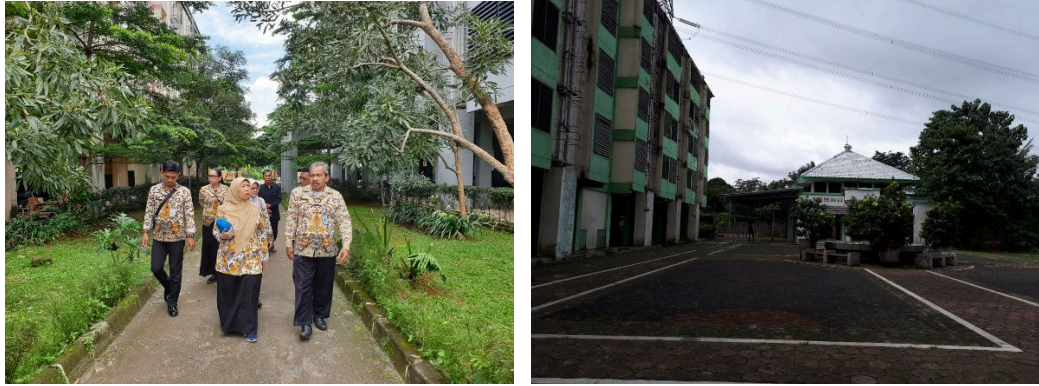
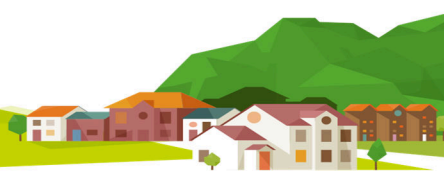


Foto: Monitoring Sekretaris Dinas ke UPT Rusunawa Kota Depok

Capaian kinerja nyata indikator 6 "Persentase rumah layak huni" adalah sebesar 99.62 dari target sebesar 99.39 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.20 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2018 adalah tahun ke 2 (dua) renstra, capaian kinerja indikator 6 "Persentase rumah layak huni" tahun ini adalah sebesar 99,62 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman maka capaian kerjanya mencapai 100.20 %.

- ❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :
 - Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam mengatasi kawasan kumuh, sanitasi serta backlog dan rumah tidak layak huni;
 - Dukungan seluruh bidang dan UPT di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam mengatasi kawasan kumuh, sanitasi serta backlog dan rumah tidak layak huni;
 - Etos kerja yang baik dan ikhlas dari seluruh keluarga besar Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mengatasi kawasan kumuh, sanitasi serta backlog dan rumah tidak layak huni.
 - Peran serta para stakeholder Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam mencapai keberhasilan dalam mengatasi kawasan kumuh, sanitasi serta backlog dan rumah tidak layak huni.
- ❖ Hambatan :
 - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya sehingga menjadi kawasan kumuh baru.
 - Minimnya SDM pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang melakukan monitoring program/ kegiatan terkait.



- Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak sebanding dengan tersedianya tempat tinggal/ rumah yang layak.
- Minimnya pengembang perumahan yang membangun perumahan subsidi/ untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- ❖ **Stategi / Upaya pemecahan masalah :**
Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:
 - Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai stakeholder Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan menggelar rapat koordinasi/ sejenisnya;
 - Melatih tim monitoring dengan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas;
 - Melakukan optimalisasi dan sosialisasi UPT Rusunawa Kota Depok;
 - Membuat kebijakan/ regulasi yang menaungi pengembang perumahan untuk rumah subsidi/ khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Depok.

- **Sasaran 3, Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air.**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

*Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
7	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	75.00	75.60	100.80	91.18	77.20	85.00

Sasaran Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 7 "Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman" adalah sebesar 77.20 dari target sebesar 91.18 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 85.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Tahun 2018 adalah tahun ke 2 (dua) renstra, capaian kinerja indikator 7 "Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman" tahun ini adalah sebesar 77,20 %, bila dibandingkan dengan target akhir



renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman maka capaian kinerjanya mencapai 77,20 %.



Foto: Pembangunan Air Bersih Perpipaan

- ❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :
 - Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam pemenuhan akses air minum yang aman;
 - Dukungan seluruh bidang dan UPT di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam pemenuhan akses air minum yang aman;
 - Etos kerja yang baik dan ikhlas dari seluruh keluarga besar Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mengatasi pemenuhan akses air minum yang aman;
 - Peran serta para PDAM Kota Depok dalam mencapai keberhasilan untuk mengatasi pemenuhan akses air minum yang aman.
- ❖ Hambatan :
 - Kurangnya jaringan perpipaan yang ada di Kota Depok dan biaya investasi yang mahal.
 - Pipa air bersih yang dimiliki Pemkot Depok melalui PDAM sudah banyak yang melewati masa pakainya (sejak PDAM Tirta Kahuripan Kab.Bogor), sehingga dibutuhkan peremajaan.
 - Masih baiknya kondisi air tanah di Kota Depok sehingga minat masyarakat menjadi kurang untuk memasang jaringan perpipaan.
 - Pembangunan jaringan distribusi air bersih perpipaan tidak hanya dilakukan untuk jaringan sambungan rumahnya tetapi juga termasuk



pembangunan jaringan primer sehingga menyebabkan penurunan realisasi target pembangunan;

- Pada pembangunan instalasi air bersih non perpipaan tersebut berlokasi Kp. Benda Cipayung (yang terkena dampak TPA Cipayung) dan merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan sedang. Pada pekerjaan ini juga membangun instalasi baru (tower baru) dan penyelesaian pekerjaan instalasi air bersih non perpipaan tahun sebelumnya (2016), sehingga menyebabkan penurunan realisasi target pembangunan.

❖ **Strategi / Upaya pemecahan masalah :**

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan PDAM Kota Depok;
- Melakukan penganggaran dengan perencanaan yang lebih baik pada tahun mendatang agar target RPJMD dapat tercapai;
- Menjadikan pemenuhan air bersih yang aman sebagai kegiatan dengan anggaran prioritas serta mencari sumber pendanaan selain APBD Kota Depok;
- Membuat atau melakukan perbaikan kebijakan/ regulasi yang mengatur mengenai penggunaan air tanah di Kota Depok.

- **Sasaran 4, Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air.**

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

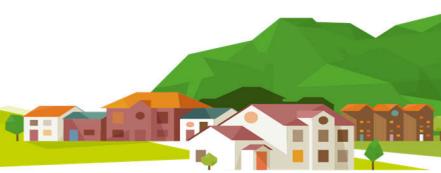
Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
8	Kualitas effluen IPLT: BOD kurang dari 90 Mg/L, TSS kurang dari 90 Mg/L	%	90	100	111.11	90	100	111.11

Sasaran Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Kualitas effluen IPLT: BOD kurang dari 90 Mg/L, TSS kurang dari 90 Mg/L" adalah sebesar 100 dari target sebesar 90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase



capaian kinerjanya adalah 111.11 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2018 adalah tahun ke 2 (dua) renstra, capaian kinerja indikator 8 "Kualitas effluen IPLT: BOD kurang dari 90 Mg/L, TSS kurang dari 90 Mg/L" tahun ini adalah sebesar 111.11 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

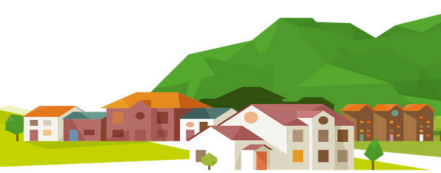


Foto: Armada UPT IPLT Dinas Perumahan dan Permukiman

- ❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :
 - Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam pemenuhan kualitas effluent IPLT;
 - Dukungan seluruh bidang dan UPT di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam pemenuhan kualitas effluent IPLT;
 - Etos kerja yang baik dan ikhlas dari seluruh keluarga besar Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mengatasi pemenuhan kualitas effluent IPLT;
 - Kolam dengan sistem baru yang mengolah limbah tinja secara terpadu dan ramah lingkungan.
- ❖ Hambatan :
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan septictank;
 - Belum seluruh warga masyarakat Depok yang menggunakan tangki septic pada asetnya;
 - Belum semua septictank dapat diakses karena kondisi jalan yang sempit dan tidak dapat dilalui oleh truk tinja;
 - Armada yang masih sedikit, hanya 12 unit truk tinja yang dimiliki oleh UPT IPLT Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.
- ❖ Strategi / Upaya pemecahan masalah :

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

 - Melakukan sosialisasi secara online melalui sosial media atau media cetak (sticker);



- Segera menerapkan kebijakan LLTT yang mana nantinya setiap rumah akan mempunyai jadwal sedot yang terukur;
- Mengadakan motor tinja dan pembelian selang dan mesin sedot untuk menambah jangkauan;
- Menambah armada UPT IPLT Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.

H. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

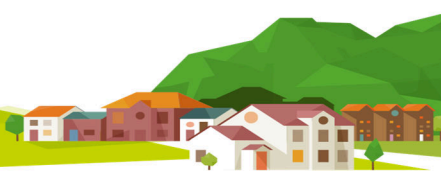
Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok selama Tahun 2018, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memahami dan memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan dan proses-proses terkait perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kompetensi keahlian yang dibutuhkan yaitu manajemen, sains, teknik sipil, arsitektur, planologi, administrasi publik dan hukum,

Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan. Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan kepemimpinan, manajemen, pelaporan, konstruksi, perumahan, sarana dan prasarana, pelayanan prima, dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/ kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), fungsional penyelenggaraan bangunan gedung (termasuk dalam penerbitan

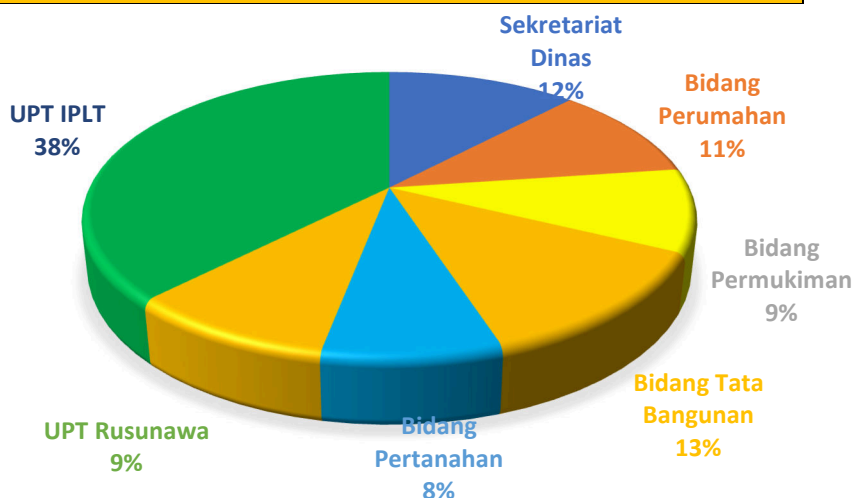


Sertifikat Laik Fungsi/SLF), serta penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2018 didukung oleh 149 personal pegawai, yang terdiri dari 68 (Enam Puluh Delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 81 (Delapan Puluh Satu) orang tenaga Non-PNS, dengan rincian pegawai berdasarkan bidang/ bagian tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 3.14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/ Bidang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/ Bidang				
1	Sekretariat Dinas	:	18	Orang 11%
2	Bidang Perumahan	:	16	Orang 12%
3	Bidang Permukiman	:	14	Orang 9%
4	Bidang Tata Bangunan	:	19	Orang 13%
5	Bidang Pertanahan	:	12	Orang 8%
6	UPT Rusunawa	:	14	Orang 9%
7	UPT IPLT	:	56	Orang 38%
Jumlah			149	Orang 100%



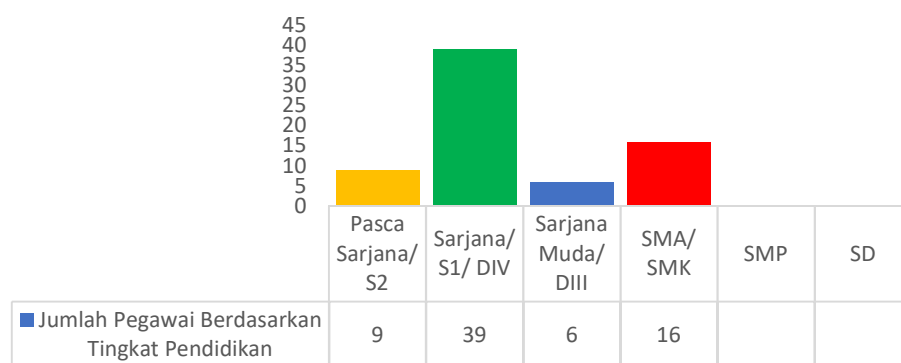
Gambar 3.5 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/ Bidang

Jumlah sumber daya pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 3.15 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan				
1	Pasca Sarjana/ S2	:	9	Orang 13%
2	Sarjana/ S1/ DIV	:	39	Orang 56%
3	Sarjana Muda/ DIII	:	6	Orang 8%
4	SMA/ SMK	:	16	Orang 23%
5	SMP	:	-	Orang 0%
6	SD	:	-	Orang 0%



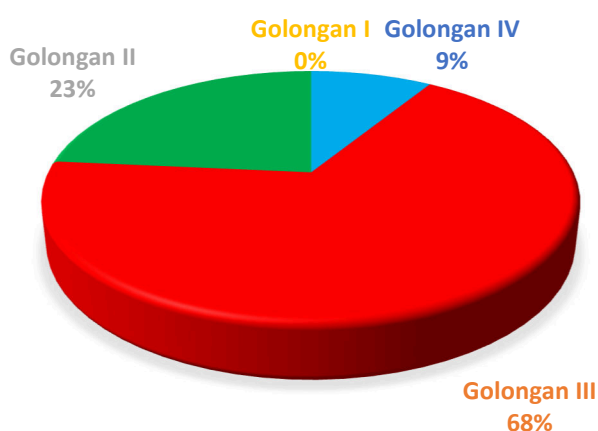


Gambar 3.6 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah sumber daya pegawai berdasarkan golongan pegawai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 3.16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan					
1	Golongan IV	:	6	Orang	9%
2	Golongan III	:	46	Orang	68%
3	Golongan II	:	16	Orang	23%
4	Golongan I	:	-	Orang	0%



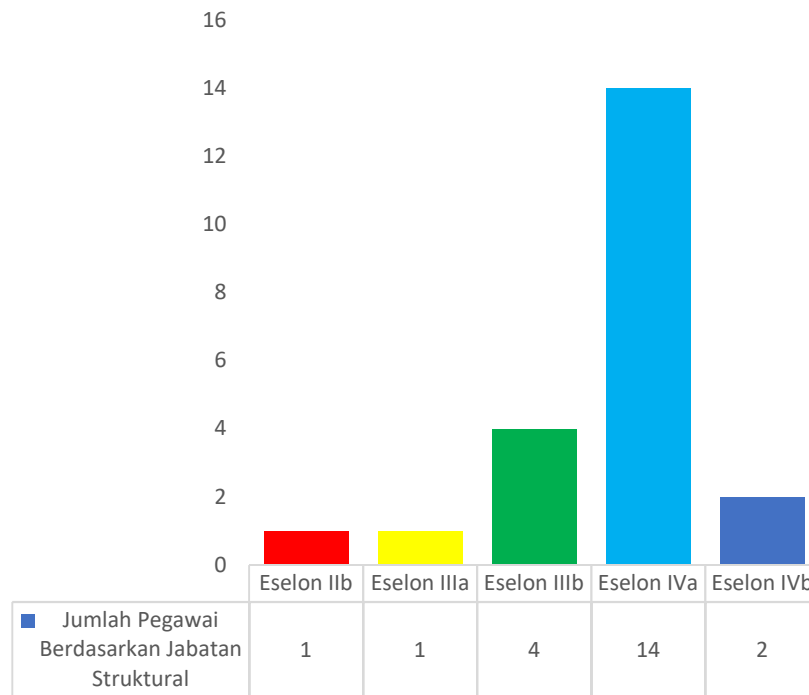
Gambar 3.6 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural berdasarkan pegawai yang telah diangkat oleh walikota untuk menduduki jabatan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 3.17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural				
1	Eselon IIb	:	1	Orang
2	Eselon IIIa	:	1	Orang
3	Eselon IIIb	:	4	Orang
4	Eselon IVa	:	14	Orang
5	Eselon IVb	:	2	Orang





Gambar 3.7 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

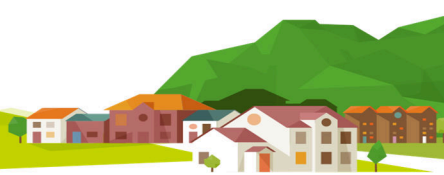
Aset dan perlengkapan kerja merupakan salah satu hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Jenis perlengkapan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok pada tahun 2018 adalah:

a. Kendaraan Dinas dan Operasional

Jumlah kendaraan dinas dan operasional sebanyak 28 unit, antara lain:

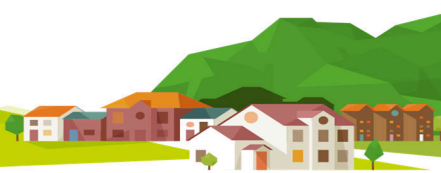
- 1) Kendaraan bermotor roda 4 : 7 (tujuh) unit
- 2) Kendaraan bermotor roda 2 : 21 (dua puluh satu) unit

b. Inventaris Kantor



Tabel 3.18 Inventaris Kantor

Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
- Transportable Water Pomp	: 14	- Unit Power Suplay	: 1
- Generator Set	: 1	- Tangga Aluminium	: 2
- Palu Godam	: 2	- Dispencer	: 5
- Tambang Dadung	: 2	- Handycam	: 2
- Tali Pursik	: 2	- Trolley 150 Kg	: 2
- Meter Calibrator	: 24	- Alat Pembantu Kebakaran	: 5
- Global Positioning System	: 19	- Site Body Hermes	: 5
- Garis Pembatas	: 10	- Sepatu Pengaman	: 17
- Mesin Tik Manual	: 3	- Mainframe	: 1
- Rak Besi/Metal	: 3	- PC	: 54
- Filling Besi/Cabinet	: 20	- Laptop	: 7
- Lemari Sorok	: 12	- Tablet Smartphone	: 0
- Lemari Kaca	: 2	- Camera CCTV	: 5
- Brankas	: 2	- CPU	: 1
- Roll Opack	: 10	- Printer	: 40
- Alat Penghancur Kertas	: 4	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	: 2
- White Board	: 5	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	: 8
- Mesin Absensi	: 1	- Meja Kerja Pegawai Non Struktu	: 24
- Lemari Kayu	: 3	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	: 6
- Rak Kayu	: 1	- Meja Tamu Biasa	: 1
- Meja Kayu/Rotan	: 5	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	: 1
- Kursi Besi/Metal	: 30	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	: 12
- Meja Rapat	: 11	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktu	: 32
- Meja	: 9	- Lemari Buku Untuk Pejabat Esel	: 1
- Meja Resepsionis	: 3	- Lemari Arsip Untuk Arsip Dinam	: 5
- Kursi Tamu	: 26	- Buffet Kaca	: 2
- Kursi Putar	: 13	- Proyektor + Attachment	: 3
- Bangku Tunggu	: 19	- Pesawat Telephon	: 4
- Meja Komputer	: 16	- Handy Talky	: 20
- Sofa	: 6	- Jaringan Teknologi Informasi	: 1
- Mesin Penghisap Debu	: 3	- Pipa U	: 3
- Tempat Sampah	: 8	- Lampu Pijar	: 1
- AC Split	: 2	- Generator Set (Lab Scale)	: 1
- Kipas Angin	: 2	- Mobil Crane	: 0
- Tabung Gas	: 3	- Aquarium	: 1
- Televisi	: 5	- Alat Ukur	: 2
- Wireless	: 1	- Partisi	: 1
- Microphone Table Stand	: 2		



2. Sumber Daya Anggaran

Tabel 3.19 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
								ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	5		6		7	8	9	10	11
1	Peningkatan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100	%	100	%	100	1.037.000.000	1.028.458.142	99,18%	
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	58	Jenis	58	Jenis	100	200.000.000	199.233.000	99,62%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	27	Jenis	27	Jenis	100	110.000.000	104.951.100	95,41%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14	Jenis	14	Jenis	100	12.000.000	12.000.000	100,00%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dinas	27	Jenis	27	Jenis	100	25.000.000	24.930.000	99,72%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
5	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	300 ; 420 ; 1980 ; 2400 ; 10	Galon ; Dus ; Boks makan ; Boks snack ; dan macam	300 ; 420 ; 1980 ; 2400 ; 10	Galon ; Dus ; Boks makan ; Boks snack ; dan macam	100	190.000.000	189.861.900	99,93%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
6	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah OH perjalanan dinas	60 ; 90	Orang ; Hari	60 ; 90	Orang ; Hari	100	500.000.000	497.482.142	99,50%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100	%	100	%	100	467.000.000	437.090.962	93,60%	
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor operasional dinas	5 ; 20	Kendaraan roda 4 ; Kendaraan roda 2	5 ; 20	Kendaraan roda 4 ; Kendaraan roda 2	100	102.000.000	99.579.362	97,63%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
								ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	5		6		7	8	9	10	11
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah alat yang dipelihara	4	Jenis	4	Jenis	100	15.000.000	14.980.000	99,87%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor	7	Jenis	7	Jenis	100	350.000.000	322.531.600	92,15%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun ; Nilai LAKIP OPD ; Cakupan laporan kinerja dan keuangan ; Jumlah laporan evaluasi kinerja triwulanan	2 ; B ; 12 ; 4	Laporan ; Predikat ; Dokumen ; Laporan	2 ; B ; 12 ; 4	Laporan ; Predikat ; Dokumen ; Laporan	100	90.000.000	89.350.000	99,28%	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100	90.000.000	89.350.000	99,28%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
4	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan	Jumlah fasilitas pelayanan terbangun yang ramah anak dan lansia pertahun	28 ; 32	Unit ; Paket	24 ; 30	Unit ; Paket	85,37 ; 93,75	115.527.009.572	103.312.216.326	89,43%	
1	Pembangunan Gedung RSUD Kota Depok(Lanjutan)	Jumlah Gedung RSUD yang dibangun	1 ; 30	Unit ; %	1 ; 30	Unit ; %	100	18.893.700.000	17.954.986.000	95,03%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
2	Rehabilitasi Gedung Balai Rakyat	Jumlah balai rakyat yang direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	3.592.723.822	3.591.020.822	99,95%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan	Jumlah kantor kelurahan yang dibangun	2	Unit	2	Unit	100	4.200.000.000	4.142.965.838	98,64%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
4	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	5	Unit	5	Unit	100	9.700.000.000	8.547.220.651	88,12%	3 pekerjaan selesai, 1 pekerjaan melewati tahun anggaran (Pusk. Ratujaya)
5	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	10	Unit	10	Unit	100	2.000.000.000	1.993.230.000	99,66%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
								ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	5		6		7	8	9	10	11
6	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Kesehatan	Jumlah gedung instalasi farmasi yang direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	350.000.000	331.987.818	94,85%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
7	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang direhabilitasi	8	Paket	7	Paket	87,5	21.000.000.000	15.153.739.643	72,16%	1 paket gagal lelang (SDN Mekarjaya 2); 6 pekerjaan selesai; 1 pekerjaan melewati tahun anggaran (SDN Sukamaju 5)
8	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan SMP Negeri	Jumlah SMP Negeri yang direhabilitasi	1	Paket	1	Paket	100	3.200.000.000	3.196.347.000	99,89%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
9	Pembangunan dan Penataan Lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	Jumlah Sekolah TK Negeri dan SD Negeri yang terbangun	23	Paket	21	Paket	91,3	31.486.849.360	28.082.904.954	89,19%	1 paket gagal lelang (SDN Rangkapan Jaya) ; 1 paket tidak dikerjakan (SDN Pondok Cina 1); 21 pekerjaan selesai; 1 pekerjaan melewati tahun anggaran (SDN Curug Cimanggis 5)
10	Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMP Negeri	Jumlah Sekolah SMP Negeri yang dibangun	1	Paket	1	Paket	100	3.700.000.000	3.698.173.000	99,95%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
11	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor UPT Pendidikan	Jumlah kantor UPT pendidikan yang dibangun	-	Unit	-	Unit	-	-	-	-	Kegiatan tidak dikerjakan karena UPT dibubarkan
12	Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	220.000.000	219.250.000	99,66%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
13	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Olahraga	Jumlah bangunan olah ragayang dibangun	1	UnitStadion Merpati(Lanjutan)	1	UnitStadion Merpati(Lanjutan)	100	10.000.000.000	9.746.834.000	97,47%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
								ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	5		6		7	8	9	10	11
14	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun	1	Unit Markas, Rumah Dinas dan Barak Siaga	1	Unit Markas, Rumah Dinas dan Barak Siaga	100	3.200.000.000	2.848.810.600	89,03%	pekerjaan melewati tahun anggaran
15	Pembangunan Stadion dan Penataan Lapangan Olahraga Mahakam (Lanjutan) Bangub Jabar TA. 2018)	Jumlah Bangunan Pemerintah yang dibangun	1	Unit	1	Unit	100	3.728.870.390	3.549.880.000	95,20%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
16	Kebutuhan Mendesak Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Bhaktijaya 1	Jumlah Bangunan Pemerintah yang direhabilitasi	-	Unit	-	Unit	-	254.866.000	254.866.000	100,00%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
5	Peningkatan kualitas perencanaan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100	%	100	%	100	4.028.453.750	3.191.749.350	79,23%	
1	Pelaksanaan Forum OPD dan penyusunan Renja	Tersusunnya LAKIP dan RENJA	2	Dokumen	2	Dokumen	100	90.000.000	82.615.300	91,79%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
2	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah	9	Dokumen	9	Dokumen	100	1.446.000.000	881.007.300	60,93%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Survey dan Monev Bidang Perumahan	Terselenggaranya Kegiatan survey pra perencanaan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	100.000.000	99.180.000	99,18%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
4	Pendataan Aset Bangunan Pemerintah Berbasis Spasial	Jumlah dokumen data aset bangunan pemerintah berbasis spasial	1	Dokumen	1	Dokumen	100	90.000.000	88.860.000	98,73%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
5	Penyusunan data spasial perumahan dan kebutuhan Rumah di Kota Depok	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	500.000.000	472.078.000	94,42%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
6	Kajian UKL/UPL Bangunan Pemerintah	Jumlah Dokumen UKL/UPL Bangunan Pemerintah	1	Dokumen	1	Dokumen	100	63.800.000	63.040.000	98,81%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
								ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	5		6		7	8	9	10	11
7	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	27	Dokumen	27	Dokumen	100	1.525.333.750	1.308.933.750	85,81%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
8	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehabilitasi gedung kesehatan	2	Dokumen	2	Dokumen		213.320.000	196.035.000	91,90%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
6	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk hukum yang dihasilkan	400		400		100	649.520.000	572.929.500	88,21%	
1	Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya naskah akademis peraturan daerah tentang perumahan dan kawasan permukiman	1	Dokumen	1	Dokumen	100	500.000.000	436.881.500	87,38%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	149.520.000	136.048.000	90,99%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
7	Penataan dan Pengadaan Lahan	Ketersediaan lahan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah	41	Lahan	47	Lahan	115%	47.591.180.000	43.898.729.200	92,24%	
1	Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota	Luas lahan RTH/Taman Kota yang dibebaskan	4	Area	3	Area	75%	9.000.000.000	8.691.788.000	96,58%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
2	Pengadaan Lahan RSUD Wilayah Timur	Luas lahan RSUD yang dibebaskan	1	Area	1	Area	100	28.487.115.000	28.101.366.200	98,65%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Studi Kelayakan Bank Tanah (Land Banking)	Jumlah Dokumen Bank Tanah (Land Banking)	1	Dokumen	1	Dokumen	100	104.065.000	101.987.000	98,00%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Lahan untuk TPA	Luas Lahan TPA yang dibebaskan	1	Area	1	Area	100	8.000.000.000	6.881.208.000	86,02%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
			1	5	6	7		ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Pengadaan Lahan untuk Jalan Masuk Kelurahan Ratujaya	Luas lahan jalan masuk kelurahan yang dibebaskan	1	Area	-	Area	0	2.000.000.000	122.380.000	6,12%	Belanja Lahan tidak akan diserap karena pada siteplan 2007 merupakan fasos fasum
8	Pelayanan dan pengelolaan air limbah	Jumlah IPAL komunal/ kawasan terbangun	32	IPAL	32	IPAL	100	14.381.870.776	11.966.819.323	83,21%	
1	Pembangunan IPAL Komunal	Jumlah IPAL terbangun	4	IPAL	4	IPAL	100	2.000.000.000	1.902.896.642	95,14%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
2	Pembinaan KSM Pengelola IPAL Komunal Berbasis Masyarakat	Jumlah KSM yang terbina	26	KSM	26	KSM	100	120.000.000	120.000.000	100,00%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Pengelolaan IPLT	Luas Areal IPLT, Jumlah unitKendaraan, Jumlah unitMesin Potong Rumput,danJumlah h Petugas IPLT, JumlahKaryawan UPT IPLT, JumlahKendaraan yang dipelihara	31328 ; 12 ; 5 ; 58 ; 58 ; 13	31328 M2, 12 Unit Truk Tinja, 5 Unit Mesin Potong Rumput, 58 Org Petugas IPLT (12Bulan), 58 Karyawan Non PNS UPT IPLT, 13 Unit kendaraan yang dipelihara	31328 ; 12 ; 5 ; 58 ; 58 ; 13	31328 M2, 12 Unit Truk Tinja, 5 Unit Mesin Potong Rumput, 58 Org Petugas IPLT (12Bulan), 58 Karyawan Non PNS UPT IPLT, 13 Unit kendaraan yang dipelihara	100	4.524.740.000	3.756.810.155	83,03%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
4	Pemeliharaan IPLT	Jumlah Sarpras /Kolam yang di Pelihara	4	Kolam	4	Kolam	100	600.000.000	598.408.000	99,73%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
								ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	5		6		7	8	9	10	11
5	Pembangunan IPLT	Jumlah Sarana Penunjang Kolam IPLT yang terbangun		Gardu Listrik, Pagar, Turab, Pagar, Taman, Saluran Outlet, dan Pembuatan jalan IPLT		Gardu Listrik, Pagar, Turab, Pagar, Taman, Saluran Outlet, dan Pembuatan jalan IPLT	100	1.590.930.000	1.580.293.000	99,33%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
6	Pengadaan sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah mesin yang dibeli	1	Set mesin pengolahan lumpur tinja	1	Set mesin pengolahan lumpur tinja	100	1.000.000.000	918.546.750	91,85%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
7	Pemeliharaan IPAL Komunal	Jumlah IPAL terpelihara	20	IPAL	21	IPAL	105	230.000.000	225.230.000	97,93%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
8	Pembangunan IPAL Komunal (Bankeu Pemprov DKI Jakarta TA 2018)	Jumlah IPAL Komunal	3	IPAL	0	IPAL	0	1.451.566.000	-	-	Dana dari Bankeu DKI Jakarta baru keluar tanggal 10 Desember 2018, sehingga diambil kebijakan untuk dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun 2019
9	Pembangunan IPAL Komunal (DAK Fisik TA 2018)	Jumlah IPAL Komunal	6	IPAL	6	IPAL	100	2.764.000.000	2.764.000.000	100,00%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
10	Pembangunan IPAL Komunal (DAK Penugasan TA 2017)	Jumlah IPAL Komunal	4	IPAL	4	IPAL	100	100.634.776	100.634.776	100,00%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
								ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	5		6		7	8	9	10	11
9	Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik ; Persentase panjang drainase lingkungan yang terbangun/ terhabilitasi	95,50 ; 12,19	% ; %	95,50	% ; %	100	3.469.810.000	3.429.168.000	98,83%	
1	Replikasi PNPM MP	Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat	63	BKM	63	BKM	175	350.000.000	349.536.000	99,87%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
2	Sinergitas Program Kotaku	Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat	63	BKM	63	BKM	175	300.000.000	291.700.000	97,23%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Pemeliharaan PSU Perumahan	Terpeliharanya PSU perumahan	9	Lokasi	9	Lokasi	100	2.769.810.000	2.738.267.000	98,86%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
4	Updating dan Maintenance Aplikasi Sistem Informasi PSU Perumahan	Jumlah dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	50.000.000	49.665.000	99,33%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
10	Pengembangan dan pemeliharaan perumahan bersusun	Jumlah rumah susun yang terbangun/ terpelihara ; Tingkat hunian rumah susun	3 ; 42 (115)	Tower ; % (Unit)	3	Tower ; % (Unit)	100	2.315.000.000	2.202.078.754	95,12%	
1	Pengelolaan Rusunawa	Jumlah rumah susun yang dikelola	3	Tower	3	Tower	100	1.915.000.000	1.841.371.854	96,16%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
2	Penyusunan Feasibility Study (FS) Rumah Susun	Tersedianya dokumen feasibility study (FS) rumah susun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	200.000.000	188.900.000	94,45%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Kajian Standar Teknis Pembangunan Rumah dan Perumahan di Kota Depok	Jumlah dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	200.000.000	171.806.900	85,90%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
								ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	5		6		7	8	9	10	11
11	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih	Cakupan layanan air bersih perpipaan ; Cakupan layanan air bersih non perpipaan ; Kapasitas produksi IPA	22 ; 0,72 ; 1503	% ; % ; lt/d	22; 0,33; 0	% ; % ; lt/d	100 ; 45 ; 0	3.533.740.886	2.991.814.386	84,66%	
1	Pengembangan Jaringan Distribusi air Bersih Perpipaan	Jumlah sambungan rumah	1000	SR	700	SR	70	2.204.800.000	1.984.846.000	90,02%	Pembangunan jaringan distribusi air bersih perpipaan tidak hanya dilakukan untuk jaringan sambungan rumahnya tetapi juga termasuk pembangunan jaringan primer sehingga menyebabkan penurunan realisasi target pembangunan
2	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Non Perpipaan	Jumlah sambungan rumah	500	SR	100	SR	20	1.050.000.000	748.377.000	71,27%	Pekerjaan air bersih non Perpipaan tersebut berlokasi Kp Benda Cipayung (yang terkena dampak TPA Cipayung) dan merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan sedang. Pada pekerjaan ini juga membangun instalasi baru (tower baru) dan penyelesaian pekerjaan instalasi air bersih non perpipaan tahun sebelumnya (2016), sehingga menyebabkan

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
								ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	5		6		7	8	9	10	11
											perurunan realisasi target pembangunan
3	Pendataan Sumber Mata Air Kota Depok	Jumlah dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	200.000.000	179.650.500	89,83%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
4	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama dan Retikulasi Kelurahan Sawangan Baru (DAK Penugasan TA 2017)	Jumlah lokasi yang terlayani air bersih	1	lokasi	1	lokasi	100	78.940.886	78.940.886	100,00%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
12	Penataan permukiman kumuh	Persentase berkurangnya luas permukiman kumuh perkotaan	0,554	% ; Kawasan	0,9	% ; Kawasan	61,56	2.298.100.000	1.734.627.228	75,48%	
1	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh	Terlaksananya perbaikan kawasan kumuh dan P2WKSS serta TMMD	2 ; 1	2 Kawasan kumuh ; 1 TMMD	2	2 Kawasan kumuh	91,30	2.298.100.000	1.734.627.228	75,48%	1 Kegiatan kawasan kumuh tidak diserap
13	Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni	0,45	%	0,35	%	128	188.418.000	176.780.228	93,82%	
1	Monitoring dan Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	113.418.000	102.938.000	90,76%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
2	Updating Pendataan RTLH	Tersedianya dokumen updating pendataan RTLH	1	Dokumen	1	Dokumen	100	75.000.000	73.842.228	98,46%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
14	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Jumlah KK yang belum berakses septictank	8828	KK	9394	KK	106	8.292.600.000	8.186.979.500	98,73%	
1	Pembangunan Septictank	Jumlah KK yang terakses septictank	700	KK	434	KK	62	7.692.600.000	7.614.574.500	98,99%	Adanya penyeragaman main hole Disrumkim pada septictank yang dibangun dan adanya pembuatan kamar mandi untuk sejumlah kk yang belum mempunyai kamar mandi. Ghal ini menyebabkan penurunan relisasi target pembangunan septictank

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2018		REALISASI KINERJA TAHUN 2018		% CAPAIAN KERJA	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	KETERANGAN
								ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	5		6		7	8	9	10	11
2	Pemeliharaan Septictank	Jumlah septictank yang terpelihara	300	Unit	329	Unit	109,67	200.000.000	197.840.000	98,92%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Penyusunan Database Bidang Permukiman	Jumlah dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	400.000.000	374.565.000	93,64%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
15	Penyediaan RTH yang berfungsi sebagai Alun-Alun Kota	Jumlah alun-alun Kota	1	Paket	1	Paket	100	37.500.000.000	33.230.372.739	88,61%	
	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Alun - alun	Jumlah alun-alun yang dibangun	1	Unit	1	Unit	100	37.500.000.000	33.230.372.739	88,61%	Kegiatan terlaksana/realisasi sesuai dengan kebutuhan
	JUMLAH							241.369.702.984	216.449.163.638	89,68%	



Pada dasarnya sebagian besar Program/ Kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, namun terdapat beberapa program/ kegiatan yang secara fisik tidak dapat memenuhi target bahkan tidak dapat terlaksana diantaranya program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan, peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih dan penataan Kawasan kumuh dengan alasan yang telah dicantumkan diatas, sedangkan keuangan realisasi hanya tercapai 89,68 % ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.

I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :



Tabel 3.20 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN
							ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Predikat SAKIP	B	-	-	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90.000.000	89.350.000	99,28%
						Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	90.000.000	89.350.000	99,28%
		2. Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100%	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan	115.527.009.572	103.312.216.326	89,43%
						Pembangunan Gedung RSUD Kota Depok(Lanjutan)	18.893.700.000	17.954.986.000	95,03%
						Rehabilitasi Gedung Balai Rakyat	3.592.723.822	3.591.020.822	99,95%
						Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan	4.200.000.000	4.142.965.838	98,64%
						Pembangunan dan Penataan Lingkungan Puskesmas	9.700.000.000	8.547.220.651	88,12%
						Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Puskesmas	2.000.000.000	1.993.230.000	99,66%
						Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Kesehatan	350.000.000	331.987.818	94,85%
						Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	21.000.000.000	15.153.739.643	72,16%
						Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan SMP Negeri	3.200.000.000	3.196.347.000	99,89%
						Pembangunan dan Penataan Lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	31.486.849.360	28.082.904.954	89,19%
						Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMP Negeri	3.700.000.000	3.698.173.000	99,95%
						Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor UPT Pendidikan	-	-	-
						Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah	220.000.000	219.250.000	99,66%
Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Olahraga	10.000.000.000	9.746.834.000	97,47%						
Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah	3.200.000.000	2.848.810.600	89,03%						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN
							ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembangunan Stadion dan Penataan Lapangan Olahraga Mahakam (Lanjutan) Bangub Jabar TA. 2018)	3.728.870.390	3.549.880.000	95,20%
						Kebutuhan Mendesak Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Bhaktijaya 1	254.866.000	254.866.000	100,00%
						Peningkatan kualitas perencanaan	4.028.453.750	3.191.749.350	79,23%
						Pelaksanaan Forum OPD dan penyusunan Renja	90.000.000	82.615.300	91,79%
						Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah	1.446.000.000	881.007.300	60,93%
						Survey dan Monev Bidang Perumahan	100.000.000	99.180.000	99,18%
						Pendataan Aset Bangunan Pemerintah Berbasis Spasial	90.000.000	88.860.000	98,73%
						Penyusunan data spasial perumahan dan kebutuhan Rumah di Kota Depok	500.000.000	472.078.000	94,42%
						Kajian UKL/UPL Bangunan Pemerintah	63.800.000	63.040.000	98,81%
						Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	1.525.333.750	1.308.933.750	85,81%
						Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Kesehatan	213.320.000	196.035.000	91,90%
						Penataan dan Pengadaan Lahan	47.591.180.000	43.898.729.200	92,24%
						Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota	9.000.000.000	8.691.788.000	96,58%
						Pengadaan Lahan RSUD Wilayah Timur	28.487.115.000	28.101.366.200	98,65%
						Studi Kelayakan Bank Tanah (Land Banking)	104.065.000	101.987.000	98,00%
						Pengadaan Lahan untuk TPA	8.000.000.000	6.881.208.000	86,02%
						Pengadaan Lahan untuk Jalan Masuk Kelurahan Ratujuaya	2.000.000.000	122.380.000	6,12%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN
							ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Peningkatan administrasi perkantoran	1.037.000.000	1.028.458.142	99,18%
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000	199.233.000	99,62%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.000.000	104.951.100	95,41%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	12.000.000	12.000.000	100,00%
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	24.930.000	99,72%
						Penyediaan makanan dan minuman	190.000.000	189.861.900	99,93%
						Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	500.000.000	497.482.142	99,50%
						Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	467.000.000	437.090.962	93,60%
						Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Bermotor	102.000.000	99.579.362	97,63%
						Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	14.980.000	99,87%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000	322.531.600	92,15%
						Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	649.520.000	572.929.500	88,21%
						Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	500.000.000	436.881.500	87,38%
						Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	149.520.000	136.048.000	90,99%
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	3. Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	1,07%	0,90%	119%	Penataan permukiman kumuh	2.298.100.000	1.734.627.228	75,48%
						Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh	2.298.100.000	1.734.627.228	75,48%
						Penyediaan RTH yang berfungsi sebagai Alun-Alun Kota	37.500.000.000	33.230.372.739	88,61%
						Pembangunan dan Penataan Lingkungan Alun - alun	37.500.000.000	33.230.372.739	88,61%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN						
							ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
						Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman	3.469.810.000	3.429.168.000	98,83%						
						Replikasi PNPM MP	350.000.000	349.536.000	99,87%						
						Sinergitas Program Kotaku	300.000.000	291.700.000	97,23%						
						Pemeliharaan PSU Perumahan	2.769.810.000	2.738.267.000	98,86%						
						Updating dan Maintenance Aplikasi Sistem Informasi PSU Perumahan	50.000.000	49.665.000	99,33%						
		4.	Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	84%	87,60%	104%	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	8.292.600.000	8.186.979.500	98,73%					
							Pembangunan Septictank	7.692.600.000	7.614.574.500	98,99%					
							Pemeliharaan Septictank	200.000.000	197.840.000	98,92%					
							Penyusunan Database Bidang Permukiman	400.000.000	374.565.000	93,64%					
							Pelayanan dan pengelolaan air limbah	6.666.200.776	5.112.761.418	76,70%					
							Pembangunan IPAL Komunal	2.000.000.000	1.902.896.642	95,14%					
							Pembinaan KSM Pengelola IPAL Komunal Berbasis Masyarakat	120.000.000	120.000.000	100,00%					
							Pemeliharaan IPAL Komunal	230.000.000	225.230.000	97,93%					
							Pembangunan IPAL Komunal (Bankeu Pemprov DKI Jakarta TA 2018)	1.451.566.000	-	-					
							Pembangunan IPAL Komunal (DAK Fisik TA 2018)	2.764.000.000	2.764.000.000	100,00%					
							Pembangunan IPAL Komunal (DAK Penugasan TA 2017)	100.634.776	100.634.776	100,00%					
							5.	Jumlah backlog kepemilikan rumah	124046 unit	77601 unit	159%	Pengembangan dan pemeliharaan perumahan bersusun	2.315.000.000	2.202.078.754	95,12%
												Pengelolaan Rusunawa	1.915.000.000	1.841.371.854	96,16%
												Penyusunan Feasibility Study (FS) Rumah Susun	200.000.000	188.900.000	94,45%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN
							ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6. Persentase rumah layak huni	99.39%	99,65%	100,30%	Kajian Standar Teknis Pembangunan Rumah dan Perumahan di Kota Depok	200.000.000	171.806.900	85,90%
						Perbaikan rumah tidak layak huni	188.418.000	176.780.228	93,82%
						Monitoring dan Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni	113.418.000	102.938.000	90,76%
						Updating Pendataan RTLH	75.000.000	73.842.228	98,46%
3	Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air	7. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	91.18%	77,20%	85%	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih	3.533.740.886	2.991.814.386	84,66%
						Pengembangan Jaringan Distribusi air Bersih Perpipaan	2.204.800.000	1.984.846.000	90,02%
						Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Non Perpipaan	1.050.000.000	748.377.000	71,27%
						Pendataan Sumber Mata Air Kota Depok	200.000.000	179.650.500	89,83%
						Pembangunan Jaringan Distribusi Utama dan Retikulasi Kelurahan Sawangan Baru (DAK Penugasan TA 2017)	78.940.886	78.940.886	100,00%
4	Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	8. Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L	90	100	111,10%	Pelayanan dan pengelolaan air limbah	7.715.670.000	6.854.057.905	88,83%
						Pengelolaan IPLT	4.524.740.000	3.756.810.155	83,03%
						Pemeliharaan IPLT	600.000.000	598.408.000	99,73%
						Pembangunan IPLT	1.590.930.000	1.580.293.000	99,33%
						Pengadaan sarana dan Prasarana IPLT	1.000.000.000	918.546.750	91,85%

J. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 sebesar Rp. 778.665.000,00 dengan target pendapatan Rp. 744.480.000,00 dengan persentase pendapatan 104,59 % atau melampaui target dengan rincian retribusi UPT IPLT sebesar Rp. 626.275.000,00 dan retribusi UPT Rusunawa sebesar Rp. 152.390.000. Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok sebesar Rp 224.821.522.183,00 atau dengan nilai persentase sebesar 89,82 % dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 8.352.130.477,00 sebesar 93,49 % dan realisasi Belanja langsung Rp 216.469.391.706,00 sebesar 89,68 %. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-1 Rp 155.722.272.830,00 (71.90 %) disusul dengan program/kegiatan di sasaran ke-2 Rp 54.072.767.867,00 (24.09 %). Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Realisasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A.	PENDAPATAN	Rp 744.480.000,00	Rp 778.665.000,00	104,59%
1	Retribusi IPLT	Rp 594.480.000,00	Rp 626.275.000,00	105,35%
2	Retribusi Rusunawa	Rp 150.000.000,00	Rp 152.390.000,00	101,59%
B.	BELANJA	Rp 250.303.006.123,00	Rp 224.821.522.183,00	89,82%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 8.933.303.139,00	Rp 8.352.130.477,00	93,49%
2	Belanja Langsung	Rp 241.369.702.984,00	Rp 216.469.391.706,00	89,68%

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran per-Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN
						ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	1 Predikat SAKIP	B	-	-	173.418.617.072	155.722.272.830	89,80%
		2 Survei kepuasan masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100%			



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KEUANGAN 2018		% CAPAIAN	
						ANGGARAN 2108 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	3	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	1,07%	0,90%	119%	60.730.128.776	54.072.767.867	89,04%
		4	Persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik	84%	87,60 %	104%			
		5	Jumlah backlog kepemilikan rumah	124046 unit	77601 unit	159%			
		6	Persentase rumah layak huni	99,39 %	99,62 %	100,20 %			
3	Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air	7	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	91,18 %	77,20 %	85%	3.533.740.886	2.991.814.386	84,66%
4	Meningkatkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	8	Kualitas effluen IPLT: BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 Mg/L	90	100	111,10 %	7.715.670.000	6.854.057.905	88,83%





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 50.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 120.57 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 85.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111.11 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja terdapat 1 sasaran yang tidak mencapai target.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 241.369.702.984,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 216.469.391.706,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 24.906.570.802,00. Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2018 sebesar Rp. 778.665.000,00 dengan target pendapatan Rp. 744.480.000,00 dengan persentase pendapatan 104,59 % atau melampaui target dengan rincian retribusi UPT IPLT sebesar Rp. 626.275.000,00 dan retribusi UPT Rusunawa sebesar Rp. 152.390.000.

Renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok 2016 - 2021 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 50.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 120.57 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 85.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111.11 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 241.369.702.984,00 (dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok adalah 89,68 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Depok.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja



Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Depok kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Depok.

Depok, Februari 2019
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok

Drs. H. Dudi Mi'raz Imaduddin, M.Si
NIP. 19691008 199010 1 001

